

Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)

Meithy Nur Arifah Suci¹, Indra Cahya Kusuma², Mas Nur Mukmin³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Bogor

e-mail : meithy.itsmyname@gmail.com¹, indra.cahya.k@unida.ac.id²,
mas.nur.mukmin@unida.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan sanksi pajak sebagai variabel pemoderasi pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dengan jumlah keseluruhan populasi sebanyak 27.540 Wajib Pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan memakai metode purposive sampling, dari metode sampling tersebut dapat ditentukan jumlah sampel sebanyak 394,27 dibulatkan menjadi 400. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode survey dengan menggunakan media kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, dan sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 secara signifikan.

Kata Kunci: *Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

Abstrak versi Bahasa Inggris ditulis menggunakan Bahasa Inggris dalam bentuk past tense. This research is performed in order to test the influence of variabel income and awareness taxpayers on tax compliance of PBB-P2 with tax sanctions as a moderating variable in Cisarua District, Bogor Regency . The population in this study is the Land and Building Tax Payer in the Cisarua District, Bogor Regency, with a total population of 27,540 Taxpayers. Sampling was carried out using purposive sampling method, sampling methods can be determined the total sample 394,27 rounded to 400. Primary data collection method used is a survey method using questionnaires media. The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis techniques. Based on the results of the analysis conducted, it is concluded that the income and awareness of taxpayers simultaneously influence the compliance of taxpayers PBB-P2, and tax sanctions can moderate the influence of income and taxpayer awareness of taxpayer compliance of PBB-P2 significantly

Keywords: *Taxprayers Income, Taxpayers Awareness, Tax Penalties And Tax Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sektor penyumbang pendapatan terbesar bagi suatu negara. Sektor perpajakan mampu menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50% daripada sektor-

sektor lainnya. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) karena tanpa pajak negara ini akan sulit melakukan pembangunan (Koentarto, 2011: 243). Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Pemerintah sejauh ini terus melakukan perubahan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya menjadi pajak daerah yang dikelola oleh daerah dan penerimaannya pun masuk ke kas daerah. Hendri dan Lena (2013: 208) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap daerah di Indonesia berhak mengelola PBB masing-masing. Pendapatan yang di dapat dari PBB tersebut menjadi pendapatan daerah. Maka dari itu, setiap daerah berhak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing daerah. Dalam mendukung optimalisasi penerimaan PBB harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun dalam pelaksanaannya pemungutan PBB masih belum maksimal, setiap tahun presentase realisasi penerimaan PBB belum mencapai target.

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah salah satu daerah yang dimana penerimaan realisasi PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) masih rendah atau belum mencapai pada target 100%. Kecamatan Cisarua terdiri dari 9 Desa dan 1 Kelurahan, yaitu Desa Citeko, Cibereum, Tugu Selatan, Tugu Utara, Batu Layang, Leuwimalang, Jogjogan, Cilember, Kopo dan Kelurahan Cisarua. Dari semua daerah yang berada di lingkaran peta Kecamatan Cisarua ini, masih belum ada yang mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai yang di harapkan pemerintah setempat. Untuk melihat realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cisarua dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Tahun 2014 - 2018 (dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Pokok	Realisasi	Sisa	Persentase(%)
2014	12.293.259	9.036.049	3.257.210	26,50
2015	23.860.167	13.835.091	10.025.075	42,02
2016	29.349.623	17.508.588	11.841.035	40,34
2017	30.766.494	19.221.904	11.544.590	37,52
2018	34.543.170	19.572.426	14.970.745	43,34

Sumber : Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor 2019

Peningkatan jumlah primer dari tahun 2014 ke tahun 2018 terlihat jelas pada Tabel 1. Dari tahun ke tahun, kepatuhan wajib pajak masih buruk. rendahnya penerimaan PBB-P2 selama lima tahun terakhir dan rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi kekhawatiran di Kabupaten Cisarua.

METODE

Dengan menggunakan pendapatan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh kepatuhan wajib pajak PBB-P2 terhadap sanksi perpajakan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tepatnya di Jalan Raya Puncak Cisarua – Bogor.

Penelitian yang penulis gunakan termasuk dalam kategori penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai faktor independen terhadap variabel dependen dengan tetap mempertimbangkan variabel moderasi. Untuk mengumpulkan data di dunia nyata, penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mensurvei sebagian populasi (Sekaran, 2009: 117).

Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Pendapatan (X1) merupakan variabel independen penelitian. Y adalah kepatuhan wajib pajak dalam penelitian. Dalam penelitian ini sanksi perpajakan (Z) bersifat moderat. Ukuran kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor meliputi jumlah uang yang diterima, kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, sanksi yang tegas bagi pelanggar, dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tepat waktu.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Masyarakat yang telah membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor menjadi subjek penelitian ini. Rumus Slovin digunakan dengan cara berikut untuk memastikan sampel:

$$n = \frac{N}{(N \cdot e^2) + 1}$$

Dimana :

n = jumlah sampel

N = populasi

e = persen kelonggaran ketidaktepatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 5%

Dengan menggunakan perhitungan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 27.540 wajib pajak di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan jumlah sampel kita adalah 394,27 (dibulatkan menjadi 400).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Jumlah responden yang dijadikan sampel adalah 400 responden wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Untuk menggambarkan karakteristik responden maka dilakukan deskriptif penelitian berdasarkan pengelompokan menurut jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, pekerjaan dan jumlah penghasilan. Rekapitulasi karakteristik responden diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Karakteristik Responden

No	Kriteria Responden	Karakteristik	Orang/Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki – laki	262/65,5%
2	Usia	20-30	240/60,0%
3	Pendidikan	SLTA	325/81,3%
4	Jenis Pekerjaan	Karyawan Swasta	265/66,2%
5	Jumlah Penghasilan	2.000.000-5.000.000	270/67,5%

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 262 orang dengan tingkat Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta dan penghasilan kisaran 2.000.000-5.000.000. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PBB terbanyak yaitu laki-laki dengan tingkat pendidikan hanya mencapai sekolah lanjutan tingkat atas. Rekapitulasi tanggapan responden diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Responden

No	Variabel	Nilai Rata – Rata	Tanggapan Responden
1	Pendapatan Wajib Pajak (X1)	4.08	Setuju
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	4.14	Setuju
3	Sanksi Pajak (Z)	4.12	Setuju
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	4,11	Setuju

Pengujian Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui seberapa berhasil suatu alat atau instrumen menilai sasaran yang dituju. Agar penelitian menjadi “valid”, alat ukur harus akurat. Tabel berikut menguji validitas Pendapatan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y):

Tabel 4. Rekapitulasi Rata – Rata Uji Validitas

No	Variabel	r_{hitung}	r_{kritis}	Kesimpulan
1	Pendapatan Wajib Pajak	0,699	0,3	Valid
2	Keadaran Wajib Pajak	0,675	0,3	Valid
3	Sanksi Pajak	0,672	0,3	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,712	0,3	Valid

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019

Berdasarkan tabel 4, semua instrumen memiliki nilai estimasi di atas 0,3, yang menunjukkan validitas dan kesesuaian. Kompetensi penghasilan wajib pajak, pengetahuan, hukuman, dan kepatuhan mendukung hal tersebut. Skor variabel rata-rata 0,699, 0,675, 0,672, dan 0,712.

Pengujian Reliabilitas

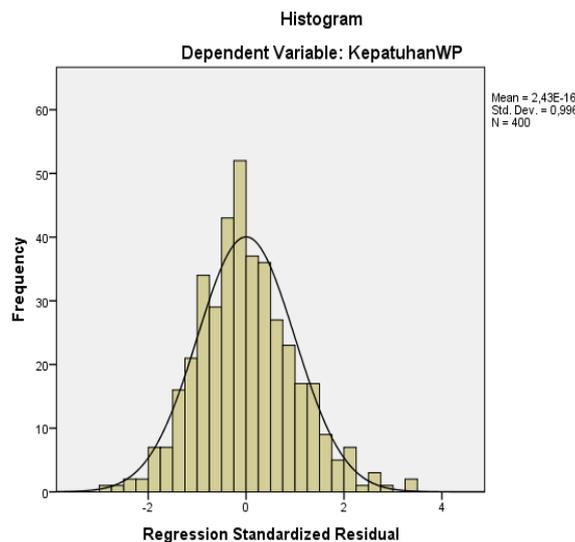
Pengujian reliabilitas mengikuti pengujian validitas. Untuk memastikan bahwa instrumen pengumpul data akurat, stabil, dan tepat, serta temuan pengukuran akan sama bila diuji kembali, maka digunakan pengujian ini.

Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi memerlukan pengujian asumsi tradisional terlebih dahulu. Secara konvensional, model regresi tidak boleh memiliki multikolinearitas, heteroskedastisitas, atau normalitas.

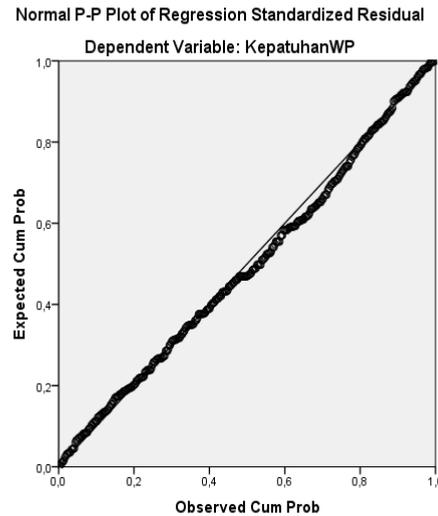
Uji normalitas menentukan apakah variabel terikat dan bebas model regresi normal. Model regresi dengan distribusi normal lebih disukai.

Penggunaan plot probabilitas normal dan histogram adalah praktik standar saat menguji kenormalan. Dengan memeriksa plot probabilitas normal dan grafik histogram berikut, kita dapat melihat tindakan analisis grafis.



Gambar 1 Grafik Histogram

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019



Gambar 2 Grafik Normal P-P Plot

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menentukan apakah variabel independen saling berhubungan secara substansial. Model regresi unggul mempunyai sifat non multikolinearitas dan tidak ada korelasi antar variabel. Temuan uji multikolinearitas penelitian ini terdapat di bawah ini.

Tabel 5. Uji Mutikolinearitas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PendapatanWP	,754	1,326
	KesadaranWP	,682	1,466
	SanksiPajak	,671	1,491

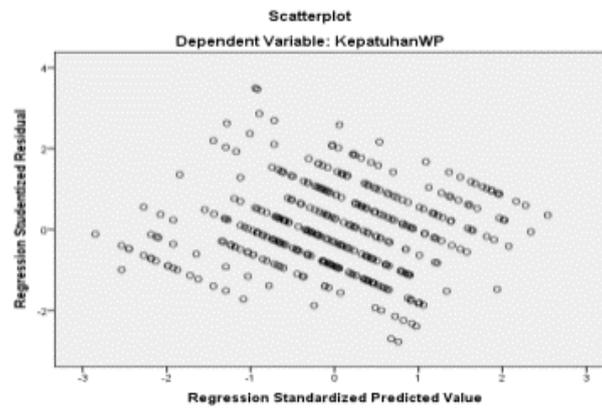
a. Dependent Variable: KepatuhanWP

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019

Tabel 5 menunjukkan toleransi variabel pendapatan wajib pajak sebesar 0,754 dan VIF sebesar 1,326. Sedangkan sanksi perpajakan sebesar 1,326 dan 0,754, kesadaran wajib pajak sebesar 1,466 dengan toleransi sebesar 0,682. Pengukuran: VIF: 1,491; toleransi: 0,671. Tidak adanya multikolinearitas atau non-multikolinearitas dalam model regresi ditunjukkan dengan ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,1.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya tanda-tanda variansi yang tidak merata pada seluruh data dalam model regresi, dan untuk menunjukkan besarnya varian perancu. Gambar 3 di bawah ini menampilkan grafik scatterplot yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 3 Grafik Scatterplot

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019

Metode Analisa Data

Persamaan Regresi Linier Berganda

Hubungan fungsional antara variabel terikat dan banyak variabel bebas, serta naik atau turunnya variabel bebas, dapat ditunjukkan dengan analisis regresi linier berganda.

Koefisien Korelasi Ganda

Dengan menggunakan analisis koefisien korelasi berganda, kami menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Bogor untuk melihat apakah terdapat hubungan yang cukup besar antar variabel independen.

Koefisien Determinasi (R²)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pendapatan, pengetahuan, dan sanksi perpajakan yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Kuadratkan koefisien korelasinya lalu kalikan dengan 100% untuk mendapatkan koefisien determinasi, atau lihat saja angka R Square (R²). Temuan koefisien determinasi ditunjukkan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Koefisien Determinasi R²
 Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,670 ^a	,449	,445	1,695

a. Predictors: (Constant), SanksiPajak, PendapatanWP, KesadaranWP

b. Dependent Variable: KepatuhanWP

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019

Nilai R² sebesar 44,9% adalah 0,449 pada tabel 6. Tanggung jawab pengelolaan keuangan ditunjukkan sebesar 44,9% disebabkan oleh variabel independen dan 55,1% disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait dengan penelitian. Saat memprediksi nilai Y, Standard Error of Estimate mengukur seberapa buruk model regresi.

Pengujian Hipotesis

Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk memverifikasi atau menyangkal asumsi kerja mengenai permasalahan yang dihadapi.

Uji F

Dampak pengetahuan, sumber daya keuangan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan diperiksa dalam tes ini. Uji F ini menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_o) apabila Fhitung lebih besar dari Ftabel sebesar 0,05. Fhitung harus lebih kecil atau sama dengan Ftabel agar dapat menolak hipotesis alternatif (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_o) dengan tingkat signifikansi 0,05. Menetapkan hipotesis:

— H_o:β₁,β₂=0; Pendapatan Wajib Pajak (X₁) dan Kesadaran Wajib Pajak (X₂) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H_a:β₁,β₂≠0; Pendapatan Wajib Pajak (X₁) dan Kesadaran Wajib Pajak (X₂) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Nilai F-tabel sebesar 2,63 dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5%, dengan menggunakan $df_1 = k-1$ ($3-1=2$) dan $df_2 = n-k$ ($400-3= 397$). Dengan asumsi nilai F kurang dari 0,05, kita dapat menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a). Untuk menerima hipotesis nol (H_0) dan menolak hipotesis alternatif (H_a), nilai F harus lebih dari 0,05. Hasil uji F ditunjukkan pada tabel analisis varians (Anova) pada Tabel 4.22.

**Tabel 7. Uji F
 ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	740,128	2	370,064	111,009	,000 ^b
	Residual	1323,449	397	3,334		
	Total	2063,577	399			

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

b. Predictors: (Constant), PendapatanWP, KesadaranWP

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019

Perbandingan antara hasil uji F sebesar 111,009 dengan nilai F tabel sebesar 2,63 terlihat pada Tabel 7. Nilai F sebesar 2,63 dan nilai p lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hasil tersebut signifikan secara statistik. Daripada menerima hipotesis nol (H_0), kami memilih untuk mengadopsi hipotesis alternatif (H_a). Di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, kepatuhan wajib pajak PBB dipengaruhi oleh kekayaan dan pengalaman.

Uji t

Pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan dampak dampak perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan variabel-variabel yang ingin diukur dalam pengujian ini. Kriteria uji t menyatakan hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak apabila nilai t lebih besar dari nilai t kritis sebesar 0,05. Apabila nilai t hitung lebih kecil atau sama dengan t tabel maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima pada tingkat signifikansi 0,05. Kerangka teori:

$H_0: \beta_1=0$; Pendapatan Wajib Pajak (X_1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

$H_a: \beta_1 \neq 0$; Pendapatan Wajib Pajak (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

$H_0: \beta_2=0$; Kesadaran Wajib Pajak (X_2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

$H_a: \beta_2 \neq 0$; Kesadaran Wajib Pajak (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

$H_0: \beta_3=0$; Sanksi Pajak (Z) tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Wajib Pajak (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

$H_a: \beta_3 \neq 0$; Sanksi Pajak (Z) memoderasi pengaruh Pendapatan Wajib Pajak (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengujian hipotesis uji t dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% dengan keputusan jika nilai signifikan < 0,05 maka maka Ho ditolak dan Ha

Tabel 8. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,366	1,023		5,243	,000
	PendapatanWP	,268	,044	,272	6,121	,000
	KesadaranWP	,468	,048	,431	9,704	,000

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019

Hasil yang tertera pada tabel 8 dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Variabel pendapatan wajib pajak dengan t_{hitung} sebesar 6,121 > t_{tabel} 1,96597 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Kondisi ini bermakna bahwa pendapatan wajib pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
2. Dengan nilai t-hitung sebesar 9,704 > t-tabel 1,96597 dan tingkat signifikansi 0,000 > 0,05 maka variabel kesadaran wajib pajak menolak Ho dan menerima Ha. Kepatuhan terhadap PBB di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sedikit banyak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak.

$H_0: \beta_5 = 0$; Sanksi Pajak (Z) tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Wajib Pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

$H_a: \beta_5 \neq 0$; Sanksi Pajak (Z) memoderasi pengaruh Pendapatan Wajib Pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Moderated Regression Analisis (MRA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan wajib pajak dengan pendapatan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, serta bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$. Pada pengujian MRA ini apabila t_{hitung} lebih kecil atau sama dengan t_{tabel} maka H_0 disetujui dan H_a ditolak.

Uji Moderasi Sanksi Pajak Pada Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Moderasi ini dilakukan untuk menguji apakah variabel Sanksi Pajak (Z) memoderasi hubungan antara penghasilan wajib pajak (X_1) dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan menggunakan kepercayaan 95% dan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ atau $400 - 2 - 1 = 397$ diperoleh t_{tabel} sebesar 1,96596. Hasil keluaran SPSS untuk uji Moderasi 1 dapat dilihat pada 2 model persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderator, pada table 9 berikut ini:

Tabel 9. Uji Persamaan Regresi 1 Moderasi Sanksi Pajak Pada Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1					
(Constant)	4,798	,988		4,854	,000
PendapatanWP	,528	,048	,483	11,109	,000
SanksiPajak	,238	,043	,242	5,561	,000
F Ratio	129,445				
Sig. F	0,000				
R Square	,395				
Adj. R Square	,392				

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019

Berdasarkan tabel 9, nilai model persamaan regresi adalah:

$$y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \varepsilon$$

$$y = 4,798 + 0,528X_1 + 0,238Z + \varepsilon$$

Interpretasi model regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 4,798. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sebesar 4,798 jika variabel independen diambil 0. Dengan koefisien regresi sebesar 0,528 terlihat bahwa pendapatan wajib pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,528 poin persentase dikaitkan dengan peningkatan pendapatan wajib pajak sebesar satu satuan. Nilai Z-score sebesar 0,238 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,238 poin persentase dicapai dengan penambahan sanksi perpajakan sebanyak satu satuan.

Jika variabel independen disetel ke 0 maka kepatuhan wajib pajak dihitung sebesar 15,294 menurut model regresi. Adanya hubungan yang signifikan antara pendapatan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh koefisien regresi $X_1 = 0,261$. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,261 disebabkan oleh adanya penambahan satu satuan penghasilan wajib pajak. Sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut koefisien regresi $AZ (0,798)$. Tambahan denda perpajakan sebesar 0,798 mengakibatkan kepatuhan wajib pajak meningkat 0,798. Interaksi antara pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,025 untuk X_1Z . Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan sebesar 0,025 dihasilkan oleh peningkatan satu satuan tingkat interaksi pendapatan wajib pajak dengan sanksi perpajakan.

Nilai MRA 1 (Penghasilan dikali Sanksi) adalah 3,422 berdasarkan temuan pengujian. Pada ambang signifikansi 0,001 diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel} (3,422 > 1,96596)$. Oleh karena itu, kami menerima H_a dan menolak H_o , hipotesis nol. Hal ini dikarenakan... Denda yang dikenakan sistem perpajakan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor menurunkan korelasi pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak PBB.

Untuk memastikan apakah variabel Z berfungsi sebagai Moderator Murni, Moderator Kuasi, Variabel Moderating Prediktor, atau bukan sebagai variabel moderasi, signifikansinya pada uji regresi X_1 dan Z pada variabel Y dibandingkan dengan hasil signifikansi jika variabel interaksi X_1Z dimasukkan dalam variabel tersebut. uji regresi.

Kedua uji regresi tersebut, yang satu menggunakan variabel X_1 dan Z untuk memprediksi Y dan yang lainnya menggunakan variabel interaksi X_1Z , menunjukkan pengaruh yang sama signifikannya berdasarkan temuan SPSS. Variabel Z sanksi pajak dianggap sebagai Quasi Moderator. Hubungan kriteria (Y) dengan hubungan prediktor (X)

dapat diubah oleh variabel moderator ini. Selain berinteraksi dengan variabel prediktor lainnya, variabel moderator (Z) berfungsi sebagai variabel independen. Z, variabel yang dimaksud, dapat berperan sebagai independen dan moderator. Untuk menentukan apakah variabel moderasi sanksi pajak meningkatkan atau mengurangi hubungan antara pendapatan dan kepatuhan wajib pajak, kita dapat menganalisis perubahan temuan R Square sebelum dan sesudah uji MRA.

Uji Moderasi Sanksi Pajak Pada Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Moderasi ini dilakukan untuk menguji apakah variabel sanksi perpajakan (Z) memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak (X2) dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan menggunakan kepercayaan 95% dan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 400-2-1=397 diperoleh ttabel sebesar 1,96596. Hasil keluaran SPSS untuk uji Moderasi 2 dapat dilihat pada 2 model persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderator, pada table 10 berikut ini:

Tabel 10. Uji Persamaan Regresi 1 Moderasi Sanksi Pajak Pada Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1					
	(Constant)	3,712		3,766	,000
	KesadaranWP	,357	,048	,328	7,372
	SanksiPajak	,458	,049	,419	9,410
	F Ratio	147,398			
	Sig. F	0,000			
	R Square	,426			
	Adj. R Square	,423			

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019

Nilai-nilai model persamaan regresi dapat diperoleh dari tabel 10.

$$y = a + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z + \epsilon$$

$$y = 3,712 + 0,357X_2 + 0,458Z + \epsilon$$

Jika variabel independen bernilai 0, maka model regresi memprediksi kepatuhan wajib pajak sebesar 3,712. Pendidikan wajib pajak meningkatkan kepatuhan, menurut koefisien regresi X2 sebesar 0,357. Kepatuhan meningkat sebesar 0,357 poin persentase untuk setiap satuan pengetahuan wajib pajak. Koefisien regresi AZ sanksi pajak sebesar 0,458 yang berarti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi membuat wajib pajak lebih patuh sebesar 0,458 poin persentase.

Tabel 11. Uji Persamaan Regresi 2 Moderasi Sanksi Pajak Pada Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1					
	(Constant)	12,908		12,963	,000
	KesadaranWP	,254	,083	,413	3,115
	SanksiPajak	,321	,362	,293	,888

KesadaranX	,022	,002	,718	9,368	,000
F Ratio	86,454				
Sig. F	0,000				
R Square	,427				
Adj. R Square	,422				

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2019

Nilai-nilai model persamaan regresi dapat diperoleh dari tabel 11.

$$y = a + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z + \beta_3 X_2 Z + \varepsilon$$

$$y = 12,908 + 0,254X_2 + 0,321Z + 0,022X_2 Z + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 12,908 pada model regresi berarti kepatuhan wajib pajak sebesar 12,908 bila variabel independen bernilai 0. Pengetahuan wajib pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,254. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,254 poin dihasilkan oleh peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan. Pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan koefisien regresi AZ sebesar 0,321. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,321 dicapai dengan penambahan sanksi perpajakan sebanyak satu satuan. Interaksi antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan koefisien regresi X₂Z sebesar 0,022. Peningkatan kepatuhan sebesar 0,022 dicapai dengan penambahan satu satuan interaksi antara pengetahuan wajib pajak dengan sanksi perpajakan.

Nilai MRA 2 (Kesadaran*Sanksi) sebesar 3,115 dilaporkan dalam hasil pengujian. Pada ambang signifikansi sebesar 0,013 yang kurang dari 0,05, maka thitung lebih besar dari ttabel (3,115 > 1,96596). Oleh karena itu, kami menerima H_a dan menolak H_o, hipotesis nol. Hal ini dikarenakan... Denda yang dikenakan sistem perpajakan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor menurunkan korelasi pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak PBB.

Untuk mengetahui peranan variabel Z sebagai Moderator Murni, Moderator Kuasi, Prediktor Variabel Moderasi, atau variabel bukan moderasi, maka signifikansinya pada uji regresi X₂ dan Z pada variabel Y dibandingkan dengan hasil signifikansi bila memasukkan variabel interaksi X₂Z dalam uji regresi.

Kedua uji regresi tersebut, yang satu memasukkan variabel X₂ dan Z untuk memprediksi variabel Y dan yang lainnya memasukkan variabel interaksi X₁Z, menghasilkan temuan yang menunjukkan adanya dampak yang signifikan. Variabel Z sanksi pajak dianggap sebagai Quasi Moderator. Variabel moderator ini mengubah hubungan antara kriteria (Y) dan prediktor (X). Selain berinteraksi dengan variabel prediktor lainnya, variabel moderator (Z) berfungsi sebagai variabel independen. Variabel Z dapat berfungsi baik sebagai moderator maupun sebagai variabel independen. Untuk menentukan apakah variabel moderasi sanksi pajak meningkatkan atau mengurangi hubungan antara pendapatan dan kepatuhan wajib pajak, kita dapat menganalisis temuan R Square sebelum dan sesudah uji MRA.

Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Kompetensi dan pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB berdasarkan uji paralel. Terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan wajib pajak dan pendapatan dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian Khoiroh (2017) dan Santi (2012) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji parsial menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan wajib pajak meningkatkan kepatuhan. Pendapatan mempengaruhi pembayaran pajak tepat waktu. Individu akan membayar pajak jika standar fundamental terpenuhi. Penelitian ini mendukung Hutagaol (2017) dan Gilaso (2008) yang menemukan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap belanja dan perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang setiap tahun. Susanto (2016) menegaskan bahwa situasi ekonomi mempengaruhi pelaksanaan komitmen, termasuk pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian ini terdapat korelasi yang kuat antara pendapatan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak PBB ($p\text{-value} < 0,05$). Hasilnya, terlihat jelas bahwa kepatuhan wajib pajak PBB meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji parsial menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan. Kepatuhan tumbuh seiring dengan pengetahuan wajib pajak. Perpajakan melibatkan pengumpulan pajak, sedangkan kesadaran melibatkan pemahaman. Kesadaran pajak adalah mengetahui tentang pajak. Reaksi wajib pajak yang positif terhadap tugas pemerintahan akan mendorong kepatuhan pajak. Peraturan dan tindakan pemerintah menjamin wajib pajak mengetahui dan membayar pajak PBB. Wajib Pajak yang berpengetahuan luas akan patuh pada aturan, menurut Sapriadi (2013). Menurut penelitian ini, pemahaman wajib pajak meningkatkan kepatuhan.

Sanksi Pajak Memoderasi Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perpajakan adalah memaksimalkan pemungutan pajak daerah. Tujuannya adalah agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan dan menaatinya, dengan diberlakukannya denda perpajakan sebagai efek jera terhadap pelanggaran peraturan perpajakan. Hal ini erat kaitannya dengan tingkat pendapatan dan pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ketika individu menyadari potensi konsekuensi dari ketidakpatuhan, tingkat pendapatan mereka dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk segera membayar pajak.

Studi statistik di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa sanksi pajak mengurangi pengaruh uang dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan. Bukti seperti ini menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan alat yang efektif untuk membuat masyarakat membayar pajak secara adil. Begitu pula dengan Koefisien Determinasi yang menunjukkan adanya peningkatan pada setiap variabel yang mengalami kenaikan jika dibandingkan sebelum dan sesudah Uji MRA. Denda perpajakan meningkatkan hubungan antara faktor pendapatan dengan kesadaran wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sebagian besar wajib pajak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sudah familiar dengan sanksi yang tertuang dalam aturan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk dikenakan bunga bulanan sebesar 2% atas keterlambatan pembayaran. Hukuman ini bertujuan untuk mencegah wajib pajak terlambat menyelesaikan pembayaran pajak sehingga menimbulkan biaya tambahan. Untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu, wajib pajak harus membayar pajaknya segera sebelum tanggal jatuh temponya. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat.

Berdasarkan teori dan pengujian MRA, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB dengan memperkuat hubungan antara pendapatan dan kesadaran wajib pajak.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
2. Pendapatan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
4. Sanksi Pajak memoderasi pengaruh variabel pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dan dapat meningkatkan pengaruh tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Casal, Sandro, 2016, Tax Compliance Depends on voice of tax payers. *Journal of Economic Psychology*, Volume 56, Hal 141-150.
- Ghozali, Imam (2016), *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program Aplikasi IBM SPSS 23*, BPFE Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hendri, Jon dan Lena Farida, 2013, Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2013, Hal. 101-218.
- Hutagaol, Jhon, 2017, "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak", Jakarta: 11 November.
- Koentarto, Ilham, 2011, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat), *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi Kalimantan Juni 2011*, Volume 3 Nomor 2.
- Santi, Anisa Nirmal,. 2012, Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi empiris pada WPOP di wilayah KPP Pratama Semarang. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sekaran, Uma, 2009, *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- <https://www.pajakku.com> diakses terakhir tanggal 20 Juni 2019.
- <https://www.online-pajak.com> diakses terakhir tanggal 7 Juli 2019.